

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI
KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Bukhariy Akmal Dwi Naufal

NPP. 30.0493

Asdaf Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: bukhariyakmal@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of the many indications that can create conditions of disturbance to community life around the neighborhood of Kelapa Gading District, North Jakarta City. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how community participation in the implementation of the duties of the Community Early Vigilance Forum to prevent social conflict in Kelapa Gading sub-district, North Jakarta administrative city, DKI Jakarta province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the Community Early Vigilance Forum is a form of government strategy in a form of community organization that carries out community early vigilance, and conducts early detection or observation activities and searches for all indications that can create conditions of disturbance to community life in the surrounding environment, then these indications are collected and accommodated according to the data and information obtained in the field and later related data and information will be submitted to the local government. **Conclusion:** Government collaboration in Tuban Regency in protecting the community against the impact of limestone burning is still not going well because of changes in the transfer of authority from the local government to the central government so that the implementation of control and control cannot be carried out optimally. In order for control and control activities to be carried out properly, it is advisable to provide a share to the local government to supervise small-scale mining and provide facilities that support the work safety of limestone burning workers to reduce the negative impact of the limestone burning industry.*

Keywords: *Community Participation, Social Conflict, Social Organization*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya kemunculan indikasi-indikasi yang dapat menciptakan kondisi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mencegah konflik sosial di

kecamatan kelapa gading kota administrasi Jakarta utara provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan sebuah bentuk strategi pemerintah dalam sebuah bentuk organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kewaspadaan dini masyarakat, serta melakukan deteksi dini atau aktifitas pengamatan dan pencarian semua indikasi-indikasi yang dapat menciptakan kondisi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu indikasi indikasi tersebut dikumpulkan dan ditampung sesuai dengan data serta informasi yang didapatkan di lapangan dan nantinya data serta informasi terkait akan diserahkan kepada pemerintahan daerah. **Kesimpulan:** Kolaborasi Pemerintahan di Kabupaten Tuban dalam melindungi masyarakat terhadap dampak pembakaran batu kapur masih kurang berjalan baik karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga pelaksanaan penertiban serta pengendalian tidak bisa terlaksana secara optimal. Agar kegiatan penertiban serta pengendalian dapat terlaksana secara baik disarankan untuk memberikan andil kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pertambangan skala kecil dan memberikan fasilitas yang mendukung keselamatan kerja para pekerja pembakaran batu kapur untuk mengurangi dampak negatif industri pembakaran batu kapur.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Konflik Sosial, Organisasi Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menetapkan DKI Jakarta sebagai daerah otonomi khusus dengan status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DKI Jakarta terdiri dari lima kota administratif dan satu kabupaten administratif. Di sini, wali kota dan bupati diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi DPRD DKI Jakarta, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat seperti di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jakarta mempunyai sebuah tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai tempat perwakilan negara asing dan pusat/pewakilan lembaga internasional, yang membuatnya memiliki kekhususan tersendiri. Ditengah gemerlap dan ramainya ibukota bukan berarti semua masyarakatnya mampu bertahan hidup dengan baik. Justru ditengah ke glamoran ibukota negara banyak terjadinya masalah kesejahteraan sosial. Yang berpotensi menyebabkan adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG). ATHG adalah setiap Upaya, Kegiatan, Pekerjaan, Tindakan yang diberi sebuah nilai dan tunjukan dapat membuat masalah dan membuat keselamatan terancam, keamanan, kedaulatan bangsa. Menurut Undang - Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara, ancaman merujuk pada segala bentuk tindakan, kegiatan, atau usaha dari dalam dan luar negeri yang dapat membuat keselamatan negara terancam bahaya, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepentingan nasional di berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan tantangan adalah situasi atau upaya yang bertujuan untuk menguji atau merangsang kemampuan. Bisa juga bermakna hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Hambatan merupakan suatu hal yang mempunyai sifat melembekkan atau menghadang secara tidak konsepsional yang berasal dari *intern*. Gangguan adalah hambatan yang menyusahkan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah berperan aktif untuk menjaga dan mewaspadaai serta mencegah hal ATHG tersebut sebelum hal itu terjadi.

Kekerasan antar etnis yang terjadi di Jakarta umumnya melibatkan individu dari suku yang sama yang memiliki karakter keras dan suka bertindak impulsif, atau antara kelompok tertentu dengan masyarakat Betawi. Perselisihan yang melibatkan orang Betawi seringkali disebabkan oleh

pelanggaran kesepakatan jual beli tanah atau sewa, serta perlakuan kasar dari individu atau kelompok pendatang tertentu. Di sisi lain, konflik antar-etnis pendatang kelas bawah seringkali muncul akibat persaingan untuk mencari pekerjaan. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dapat datang dari dalam maupun luar negeri, dan tidak selalu berbentuk serangan militer. Ancaman yang tidak berwujud jauh lebih berbahaya karena sulit dikenali. Terkadang, masyarakat tidak menyadari bahwa ancaman tersebut mungkin ada di sekitar mereka, seperti dalam bentuk tontonan atau hiburan yang mereka nikmati, tetapi dapat merusak sikap dan perilaku mereka. Itulah sebabnya Ketahanan Nasional diartikan sebagai keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG untuk menjamin identitas, integritas, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam mendapatkan tujuan nasional. Bila Ketahanan Nasional rapuh atau tidak kokoh, maka ancamannya adalah keutuhan bangsa Indonesia. Diperlukan upaya peningkatan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah dalam hal pendeteksian dan pencegahan konflik sosial, termasuk penegakan hukum yang efektif untuk mengantisipasi hal tersebut. DKI Jakarta menghadapi permasalahan yang serius dalam hal keamanan dan ketertiban, dan pemerintah provinsi terus berupaya untuk menggalakkan program pencegahan dalam hal tersebut. Di Provinsi DKI Jakarta banyak terjadi gangguan keamanan yang bersifat gangguan sosial seperti tawuran. Hal ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat yang tinggal Provinsi DKI Jakarta oleh karena itu dibentuk Lembaga di masyarakat yang bernama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang di bentuk berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No 46 Tahun 2019, Mempunyai tugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan. Penyelenggaraan FKDM di Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.138 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan sebuah forum yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu tugas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya jumlah pelanggaran perda yang ada di Kota Administrasi Jakarta utara sebanyak 7696. Tentunya hal ini mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang sudah diatur dalam Peraturan daerah Nomor .8 Tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentraman dan Ketertiban umum. Yang bertugas menangani penegakan perda adalah Satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Namun alangkah baiknya sebelum terjadinya pelanggaran tersebut dapat melakukan pencegahan dan kewaspadaan dini agar dapat terhindar dan terselamatkan dari bahaya tersebut. Diperlukan tindakan deteksi dini untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar antara pemangku kebijakan guna meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di masyarakat. Tindakan ini juga dapat meningkatkan stabilitas sebuah keamanan dan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan di sebuah daerah, sekaligus memberikan antisipasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. FKDM adalah suatu forum yang dibentuk untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Pelibatan Partisipasi Masyarakat di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diharapkan, mampu membantu pemerintah setempat dalam mendekteksi dini tau meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap suatu konflik sosial Ini adalah tempat bagi berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan konflik dan peningkatan keamanan. Petugas pengaduan masyarakat adalah pegawai kecamatan dan sectoral serta unsur FKDM dan LMK berdasarkan surat tugas camat Kecamatan Kelapa Gading. Pemprov DKI Jakarta menerapkan konsep smart governance untuk mewujudkan sebuah bentuk ekosistem kota cerdas di Jakarta. Tetapi sejauh ini masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh masyarakat yang tergabung didalam Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat, seperti halnya kurangnya adanya kerjasama, koordinasi dan komunikasi antara anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah setempat dan juga pihak yang berwenang dalam pencegahan konflik sosial itu sendiri. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan memberi fasilitas kanal pengaduan yang tepat dan gampang digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dengan pengaduan. Masyarakat cenderung kurang aktif dalam melaporkan tindakan konflik sosial. Masyarakat juga kurang aktif dalam menyampaikan informasi terkait pengaduan yang dilakukan. Hal itu terbukti dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus konflik sosial.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang analisis strategi maupun bidang pengawasan oleh pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Penelitian oleh Dwi Agustina dan Edy Mulyadi (2020) yang berjudul Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta, menemukan hasil bahwa Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas cegah dini dalam penanganan konflik sosial di Provinsi DKI Jakarta yaitu memasukkan unsur sistem peringatan dini (early warning system), tindakan pencegahan konflik dan adanya pendanaan penanganan konflik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Endang Priatna, Titin Rohayati, Tinda Irawaty (2020) yang berjudul Pengawasan Pemerintah Daerah Melalui Dalam Penanggulangan Terorisme Di Kota Cimahi, menemukan hasil bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat Kota Cimahi. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kesbangpol bersama dengan pihak kepolisian, memberi edukasi kepada masyarakat terkait radikalisme dan terorisme. Penelitian oleh Lukman Hakim dan Eka Dewanti (2020) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, menemukan hasil bahwa Pemerintah memilih untuk mengumpulkan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan orang yang memang sudah terlatih dan profesional dalam hal ini dikarenakan, dengan mengumpulkan partisipasi masyarakat didalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat nantinya informasi yang didapatkan akan mudah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian oleh Lukman Hakim, Eka Dewanti (2020) bertempat di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian Dwi Agustina, Edy Mulyadi (2020) bertempat di Provinsi DKI Jakarta, Dan penelitian Endang Priatna, Titin Rohayati, Tinda Irawaty (2020) bertempat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Selain itu ketiga penelitian tersebut memiliki jenis metode yang sama namun dengan tujuan aspek yang berbeda. Penelitian oleh Lukman Hakim, Eka Dewanti dan penelitian Endang Priatna, Titin Rohayati, Tinda Irawaty menggunakan Metodologi jenis deskriptif kualitatif, dimana hasil dari penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara rinci mengenai keadaan yang ada di lapangan dan penelitian Dwi Agustina dan Edy Mulyadi menggunakan pendekatan kualitatif. Dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. Diharapkan dari penelitian terdahulu tersebut dapat

menjadi bahan referensi yang membantu dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan inspirasi untuk menulis penelitian yang dilakukan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Kecamatan Kelapa Gading Kota administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Kecamatan Kelapa Gading Kota administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dan mengetahui serta menganalisis serta mendeskripsikan upaya dalam Mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Kecamatan Kelapa Gading Kota administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam tugas forum kewaspadaan dini masyarakat untuk mencegah adanya konflik sosial di tengah masyarakat Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 6 orang yang diambil dari Camat Kecamatan Kelapa Gading, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading, dan juga Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Partisipasi menurut Ericson dalam Slamet (1993) bahwa partisipasi adalah kerelaan masyarakat untuk membantu tercapainya keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Teori ini didukung dengan tiga variable yang menjadi pusat perhatian yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan

Konflik sosial adalah suatu bentuk ketidaksepakatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang dapat berdampak negatif pada hubungan antara mereka. Untuk mengatasi konflik sosial, dibutuhkan manajemen konflik yang efektif dan tepat guna. salah satu strategi manajemen konflik sosial adalah dengan melakukan dialog antara pihak yang bertikai. Pihak yang terlibat konflik dapat duduk bersama dan saling mendengarkan pandangan masing-masing. Dalam dialog tersebut, harus terjadi pengakuan atas perbedaan dan kesepakatan harus dicapai. Proses perencanaan manajemen jumlah konflik sosial biasanya dimulai dengan pengumpulan data dan informasi mengenai konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kelapa Gading. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk

mengidentifikasi pola, penyebab, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya, berdasarkan analisis tersebut, perencanaan strategis dan taktis dibuat untuk mengurangi jumlah konflik, memperbaiki komunikasi antarpihak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membangun kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial yang muncul di lingkungannya membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah secara cepat. Hal ini dapat membantu dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan masalah sosial yang mungkin muncul di masyarakat.

3.2. Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebuah forum yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman masyarakat atau ancaman lainnya, serta mengevaluasi kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pembentukan FKDM sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan ancaman keamanan di wilayahnya. Dengan memiliki FKDM yang solid dan terorganisir, diharapkan dapat meminimalkan kerugian akibat ancaman keamanan serta mempercepat proses penanganan konflik sosial. Untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan FKDM di Kelapa Gading, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya FKDM, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi anggota FKDM, serta membentuk program reward dan penghargaan bagi anggota FKDM yang aktif dan berprestasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memfasilitasi akses dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh FKDM, seperti peralatan, transportasi, dan anggaran.

3.3. Partisipasi Dalam Tahap Pemanfaatan

Ketua Bidang Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading Mempunyai program tentang Melaporkan kejadian yang mencurigakan Masyarakat dapat membantu FKDM dengan melaporkan kejadian yang mencurigakan atau berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Jika terdapat partisipasi masyarakat dalam Forum Komunikasi Dalam Masyarakat (FKDM) di Kecamatan Kelapa Gading, maka dapat memberikan bantuan dalam bentuk kepedulian yang tinggi dari masyarakat serta mampu mengatasi permasalahan secara dini sebelum menjadi masalah yang lebih besar di lingkungan mereka, dan tidak bersikap acuh terhadap masalah sosial yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam FKDM (Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat) sangat penting untuk membangun kesiapsiagaan dan daya tanggap masyarakat dalam menghadapi konflik sosial. Melalui keikutsertaan aktif dalam FKDM, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bentuk partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat dengan bergabung dalam keanggotaan FKDM yang ada di wilayah mereka. Dengan menjadi anggota, mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan FKDM dan berkontribusi dalam upaya menjaga keamanan lingkungan mereka dan melaporkan kejadian yang mencurigakan, Masyarakat dapat membantu FKDM dengan melaporkan kejadian yang mencurigakan atau berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Melalui laporan ini, FKDM dapat memantau situasi dan mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan atau kekerasan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk menyediakan informasi dan pelatihan mengenai ancaman masyarakat dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan mengenai cara melaporkan ancaman dalam masyarakat atau situasi darurat ke lembaga yang berwenang.

Pemerintah dan masyarakat juga bekerja sama dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat yang terdampak ancaman dari masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuan dan dukungan, sementara masyarakat membantu dalam proses distribusi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta bekerja sama dalam mengembangkan rencana aksi untuk menghadapi situasi ancaman dari elemen masyarakat. Rencana aksi ini mencakup cara mengumpulkan informasi, melaporkan ke pihak yang berwenang, mengevakuasi masyarakat yang terdampak, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kecamatan Kelapa Gading dalam hal ini Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah konflik sosial, dimana setiap pengurus anggota FKDM di Kecamatan Kelapa Gading sudah seharusnya paham akan konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas FKDM walaupun sudah berjalan tetapi ada saja hambatan yang terjadi saat penggunaan sistemnya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Mencegah Konflik diantaranya adalah Perbedaan pandangan dan kepentingan di antara masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan juga kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat dalam memahami pentingnya peran FKDM dalam mencegah konflik sosial.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Jakarta Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mencegah Konflik Sosial di Kecamatan Kelapa Gading sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Komunikasi dan juga pendekatan yang dilakukan antara Pemerintah dengan Masyarakat menjadi faktor utama dalam Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mencegah Konflik Sosial di Kecamatan Kelapa Gading. Pembagian tugas dari setiap pengurus FKDM belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari banyaknya Konflik Sosial yang ada di kecamatan Kelapa Gading menandakan keberhasilan FKDM di Kecamatan Kelapa Gading menjalankan perannya dalam Mencegah Konflik Sosial di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang datang yakni dengan cara meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat FKDM di lingkungan sekitar. Selain itu FKDM dapat melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran FKDM dalam mencegah konflik sosial. Lalu dengan cara peningkatkan aksesibilitas Forum kewaspadaan dini masyarakat dapat meningkatkan aksesibilitas dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara pengaduan dan tindakan yang akan diambil.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam pelaksanaan penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas forum kewaspadaan dini masyarakat. Sehingga data yang penulis dapatkan juga masih belum lengkap untuk menjawab semua aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Jakarta Utara, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Endang Priatna, T. R. (2020). pengawasan pemerintah daerah melalui dalam penanggulangan terorisme di kota cimahi.
- Lukman Hakim, E. D. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mulyadi, D. A. (2020). Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atasCegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Dki Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Undang - Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara

